

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP DINAS PRASARANA
JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Rios Permana

BP/NIM : 2014/14133067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**SISTEM PENGENDLIAN INTERN ASET TETAP PADA DINAS
PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Rios Permana
NIM : 14133067
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018

Diketahui Oleh

Koordinator Program Diploma III



Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak
NIP. 197711232003121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


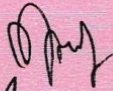
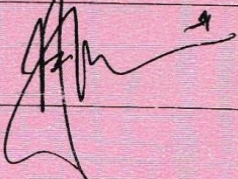
**SISTEM PENEGENDALIAN INTERN ASET TETAP PADA DINAS
PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Rios Permana
NIM : 14133067
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2018

Tim Penguji

Nama	TandaTangan
1. Ketua : Hendri Agustin, SE, M. Sc, Ak	 _____
2. Anggota : Nurzi Sebrina, SE, M, Sc, Ak	 _____
3. Anggota : Herlina Helmi, SE, M.S, Ak	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rios Permana
Thn. Masuk/NIM : 2014/14133067
Tempat/Tgl. Lahir : Panti, 11 Januari 1995
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Kuburan Nan Duo No 37
Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
Judul Tugas Akhir : Sistem Pengendalian Intern Aset tetap Pada Dinas
Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Rios Permana
NIM. 14133067

ABSTRAK

Rios Permana : Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat bergerak di bidang pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aset tetap yang ada di instansi dan pengelolaan dan pengawasan terhadap aset tetap di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SAP No 09 dan PP 71 tahun 2010

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, melakukan wawancara, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang apa saja aset tetap yang terdapat di instansi serta pengelolaan dan pengawasan aset tetap di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan SAP No 09 dan PP 71 tahun 2010. Berdasarkan 1) Pengertian Aset tetap. 2) Klasifikasi aset tetap. 3) perolehan aset tetap. 4) pengakuan aset tetap. 5) penilaian aset tetap. 6) pengeluaran setelah masa perolehan. 7) penyusutan aset tetap. 8) pemberhentian aset tetap. 9) penyajian dan pengungkapan aset tetap.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Sistem Pengendalian Intern Aset tetap Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda enny suryani dan Ayahanda akhyardi, serta kepada abang dan adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Henry Agustin, SE. M. Sc. Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan kesempurnaan tugas ak

6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
8. Karyawan dan karyawan/wati Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.
9. Rekan – rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi Diploma III Ganjil dan Genap 2014.
10. Kepada teman-teman Riandi Yogi Pratama, ivan takoci, fadil, rolland, fikri, genta yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan Tugas Akhir
11. Seluruh teman – teman yang sudah membantu dan menolong seluruh kegiatan dari awal sampai akhir tugas akhir saya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, hal itu disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki serta kurangnya kelengkapan buku – buku penunjang. Karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan isi Tugas Akhir ini, agar dapat berguna bagi pembaca untuk pengetahuan kita bersama, serta dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Padang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian SIA	9
B. Sistem Pengendalian Intern.....	15
C. Pengertian Aset tetap.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Rancangan Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43

E. Objek Penelitian.....	44
F. Sumber Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Instansi	46
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 4.1 Kartu inventaris Tanah	58
2. Tabel 4.2 Kartu Inventaris Peralatan dan Mesin	59
3. Tabel 4.3 Kartu Inventaris gedung dan bangunan	61
4. Tabel 4.4 Kartu Inventaris Jalan, Irigasi dan Jaringan	62
5. Tabel 4.5 Kartu Inventaris Aset Tetap Lainnya	64
6. Tabel 4.6 Kartu Inventaris Kontruksi Dalam Pengerjaan	65
7. Tabel 4.7 Perbandingan pergub dengan pelaksanaan pada struktur organisasi dinas prasarana jalan tata ruang dan permukiman provinsi sumatera barat	79
8. Tabel 4.8 perbandingan pp dengan pelaksanaan wewenang dan prosedur pencatatan pada dinas prasarana jalan tata ruang dan permukiman provinsi sumatera barat	81

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. SPI aset tetap di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sumatera barat.
3. Struktur organisasi
4. Kartu inventaris 2015 dan 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum menurut (Suhanda2006:2).

Laporan keuangan dalam lingkungan sector publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sector publik. Dikarenakan laporan keuangan tersebut memberikan informasi keuangan untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sector publik, memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sector publik. Informasi keuangan. Akuntansi sector publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Laporan keuangan sector public terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut. Dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan keuangan, yang mana salah satu informasi keuangan yang dibutuhkan

adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas pada periode akuntansi Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman. Pada umumnya, entitas akuntansi menyajikan asset menjadi asset lancar dan asset tidak lancar. Suatu asset dikategorikan sebagai asset lancar apabila : (a) berupa kas atau setara kas ; dan (b) asset tersebut diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset tidak lancar (Nordiawan dkk 2007:154)

Salah satu penunjang yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional instansi pemerintahan adalah aset tetap yang dimiliki dinas tersebut. Contohnya, dinas tidak akan dapat menjalankan kegiatan pekerjaannya apabila tidak memiliki gedung dan kendaraan. Aset (*plant assets*) adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik: memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Aset ini biasa diklasifikasikan sebagai property, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*); atau aset tetap (*plant assets*). Aset dalam kelompok ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun bagi dinas. Kecuali tanah, aset tetap memiliki nilai yang semakin menurun seiring dengan masa manfaatnya (Soemarso SR, 2005 : 24).

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010. Dimana PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan dari hibah/donasi, dan penyusutan. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengolahan aset tetap milik daerah agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan standar Akuntansi Pemerintah No. 07 (PSAP 07).

Dibalik pentingnya aset tetap pada instansi pemerintah, masih terdapat masalah yang timbul berupa aset tetap yang tidak disusutkan oleh instansi tersebut, aset tersebut antara lain meja eselon III, Printer canon pixma, erlenmayer 250 cc. beberapa aset tetap tersebut tidak dilakukan penyusutan karena tahun perolehan barang tersebut tidak diketahui oleh Dinas tersebut, ini diakibatkan karena seringnya dinas Prasjal tarkim pindah ruangan kerja sehingga ada beberapa arsip yang hilang. Dengan tidak dilakukannya penyusutan tersebut menyebabkan perolehan terhadap aset tetap tidak optimal dan pemanfaatan akan aset tetap kurang bermanfaat. Selain itu, aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam

memberikan jasa serta agar suatu entitas mengalokasikan biaya dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Oleh karena itu, masalah tersebut akan memberikan dampak pada laporan posisi keuangan seperti penyajian nilai aset tetap secara tidak wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah.

Disamping itu, Ada beberapa aset tetap golongan jalan, irigasi, jaringan dan juga aset tetap golongan peralatan dan mesin yang di kelola oleh Dinas Prasarana Tarkim mengalami kerusakan berat (RB) dan juga habisnya masa manfaat ekonomi seperti jembatan batang besi, jembatan talo mondan, motor grader, sepeda motor honda, wheel loader, filling cabinet tetapi belum dilakukan penghapusan atau pergantian terhadap aset tetap tersebut. Hal ini terlihat dengan tidak dipindahkannya aset tetap tersebut kedalam kategori aset lainnya di dalam kartu inventaris barang, seharusnya apabila aset tetap sudah melakukan penghapusan/pergantian maka harus di ungkap atau di sajikan ke dalam kategori aset lainnya berdasarakan Standar Akuntansi Pemerintah 09.

Seluruh aset tetap yang dimiliki pemerintah memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan guna dapat memperbaiki masalah yang timbul. Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah berguna untuk pemeliharaan dan perawatan aset tetap, sehingga menambah masa manfaat aset tetap dan meningkatkan kapasitas serta mutu produksi aset tetap. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar terhadap aset tetap.

Pengendalian intern pemerintah sendiri telah diatur oleh Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu aset tetap yang ada pada instansi harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap aset tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 2 Ayat (1) ”untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga gubernur, dan Bupati/wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintah”. SPIP pada pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan tersebut maka instansi dapat mengikhtisarkan seluruh aset tetap yang dimilikinya yang dapat memberikan keuntungan yang cukup besar.

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman sebagai

sebuah instansi yang berperan dalam pembangunan yang memiliki aset tetap, tentunya memerlukan pengendalian yang baik agar aset tetapnya terkelola dan terpelihara. Pengendalian intern dapat dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan juga tingkat keefektifitasan sistem manajemen yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman melakukan pemeriksaan secara independent yang dilakukan oleh bidang pelaksana bagian pemeliharaan setiap satu bulan sekali dan juga melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap karyawan – karyawan di instansi tersebut. Sistem pengendalian intern yg terjadi pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman tidak terlepas dari adanya kekurangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesalahan dalam pencatatan aset tetap barang yang rusak (RB).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP PADA DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN”**

B. Perumusan Masalah

Pengendalian intern terhadap aset tetap berbeda di setiap perusahaan/intansi, baik besar atau kecil sekalipun, karena masing-masing perusahaan/intansi mempunyai cara pencatatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan/intansi terkait. Dalam hal ini yang ingin

diketahui adalah bagaimanakah pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas pengendalian yang berkaitan dengan aset tetap di Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat.

1. Apa saja asset tetap yang ada pada dinas prasarana jalan tata ruang dan permukiman sumatera barat ?
2. Bagaimana system pengendalian intern pada dinas prasarana jalan tata ruang dan permukiman sumatera barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa saja aset tetap yang ada pada Dinas Prasaranan jalan Tata ruang dan Permukiman
- b. untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Prasaranan jalan Tata ruang dan Permukiman

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masuk ke Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan dan pengelolaan aset tetap yang diterapkan.

b. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan kepada penulis agar dapat mengetahui secara langsung mengenai pengendalian intern terhadap aset tetap di Dinas Prasarana jalan tata ruang dan permukiman dan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan sebenarnya.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam membuat *paper* ditahun-tahun mendatang yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap aset tetap pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab terdahulu serta hasil penelitian pada Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat, maka pada bab V ini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan yang penulis anggap penting bagi bagi pihak Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat.

1. Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat memperoleh aset tetap dengan cara pembelian tunai dan bekerja sama dengan pihak ketiga (pemborong)
2. Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat tidak melakukan penyusutan di beberapa aset tetap karena kurangnya pengawasan terhadap aset tetap
3. Pencatatan yang dilakukan untuk aset tetap belum memberikan informasi yang akurat terhadap keberadaan dari aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan serta kurangnya pemantauan yang dilakukan manajemen yang berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas operasional

B. Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan diatas sebagai penutup tugas akhir ini penulis akan mencoba memberikan saran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis, yang kiranya dapat memberikan manfaat dalam penulisan tugas akhir ini. Adapun saran-saran yang penulis

kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern aset tetap seharusnya dilakukan, misalnya dengan membentuk bagian khusus yang betul-betul menangani seluruh aset tetap seperti melakukan pemeriksaan fisik secara periodik terhadap aset tetap tersebut kemudian membandingkan dengan catatan akuntansinya. Hal ini sangat penting karena aset tetap merupakan harta yang jumlahnya besar. Tanpa keberadaan aset tetap tersebut, sebuah instansi tidak dapat menjalankan kegiatan operasional dengan baik.
2. Sebaiknya aset tetap yang mengalami kerusakan berat, dilakukan penghapusan/pergantian terhadap aset tetap tersebut agar dapat digunakan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyani, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*: Salemba Empat.
- Suhanda, (2006). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Padang : Andalas
Lima Sisi
- B. Romney, Marshall. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta:
Salemba Empat
- Nordiawan, Deddy, (2008). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediat Accounting*, Yogyakarta:
BPFE A. Murni Yusuf
- Hery. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah Dua*, Jakarta:
Sinar Grafika Offset
- Hall, James A. 2007. *Accounting Information Systems*,
Jakarta: Salemba Empat
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta:
UII Press Yogyakarta
- Hermanto, 2001, *Sistem Pengendalian Intern*, Edisi Kelima,
Penerbit Salemba Empat.
- Tim Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi (2014). *Pedoman
Penulisan Tugas Akhir*. Padang : FE UNP
- Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari lampiran PP 24 Tahun,
maupun PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern